

ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2011-2021

Fikra Terisha Azzikra^a, Melvin^b, Owen^c, Putri Sahara^d, Rynando Sadrakh Halim^e

^aFakultas Ekonomi / Program Studi Manajemen, 2141325.fikra@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^bFakultas Ekonomi / Program Studi Manajemen, 2141121.melvin@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^cFakultas Ekonomi / Program Studi Manajemen, 2141218.owen@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^dFakultas Ekonomi / Program Studi Manajemen, 2141090.putri@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^eFakultas Ekonomi / Program Studi Manajemen, 2141080.rynando@uib.edu, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

Indonesia as a developing country, most of the people live in absolute poverty line with the inability to provide and fulfill the needs of clothing and food as well as other needs that are needed in order to live and work. One of the factors that cause poverty is inflation and unemployment. In this study, the methodology used is a qualitative research method. Generally, qualitative research is descriptive and focuses more on the analysis of the discussion. This research method presents data from observations on an object, namely data on the average percentage of inflation and the unemployment rate in Indonesia in a certain period. This study discusses how the government's policies related to the threat of unemployment after rising inflation in Indonesia. Based on CEIC Data, the unemployment rate in Indonesia has increased significantly since 2020. Therefore, the government has made several policies in order to overcome the unemployment problem in Indonesia.

Keywords: *Macro Economics, Unemployment, Inflation, Government Policy*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang, sebagian besar penduduknya hidup atau hidup dalam garis kemiskinan absolut dengan ketidakmampuan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Salah satu penyebab kemiskinan adalah inflasi dan pengangguran. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Umumnya penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menitikberatkan pada analisis diskusi. Metode penelitian ini menyajikan data hasil pengamatan terhadap suatu objek, yaitu data persentase rata-rata inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode tertentu. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi di Indonesia. Berdasarkan data CEIC, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat signifikan sejak tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

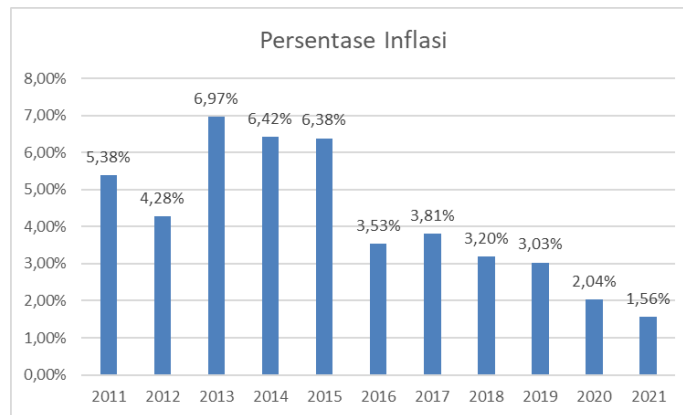
Kata Kunci: *Ekonomi Makro, Inflasi, Pengangguran, Kebijakan Pemerintah*

1. PENDAHULUAN

Suatu negara dipandang berhasil jika negara tersebut dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dapat dilihat dari ekonomi makro dan mikro di negara itu sendiri. Ekonomi makro merupakan studi tentang aktivitas yang membahas ekonomi pada suatu negara. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu perekonomian supaya negara mampu dalam memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Dalam suatu negara, kemiskinan merupakan hal yang sudah lama menjadi pokok permasalahan yang penting untuk diatasi. Kemiskinan dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dimana masyarakat tidak dapat menikmati berbagai fasilitas yang dimiliki negara seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

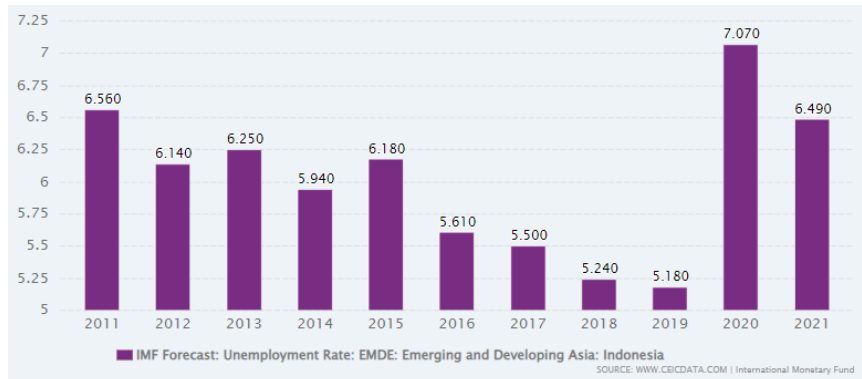
Indonesia sebagai negara berkembang, 40% dari sebagian masyarakatnya berada atau hidup pada garis kemiskinan secara mutlak dengan ketidakmampuan dalam menyediakan dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan agar bisa hidup dan bekerja. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah inflasi dan pengangguran. Inflasi dan juga tingkat pengangguran merupakan dua hal yang dapat menggambarkan kinerja ekonomi di suatu negara. Umumnya kemiskinan dapat diartikan apabila individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai suatu kemakmuran dan standar hidup (Sari, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengadakan beberapa kebijakan guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan yang telah di tentukan seperti kebijakan pembangunan ekonomi serta kebijakan penyerapan tenaga kerja. Pada zaman rezim Soeharto jatuh, dimana pemerintah Indonesia melakukan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang menonjol saat orientasi kapitalisme. Kehadiran tenaga kerja harus mampu bersaing di sektor formal karena keterampilan dan keahlian sangat diperlukan. Selain itu, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pengangguran kebijakan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor. Melalui ini, pemerintah memfasilitasi bisnis di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Langkah-langkah tersebut berguna untuk mencapai nilai tambah terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Nurrahman, 2020).



Grafik 1 Persentase Rata-Rata Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat persentase rata-rata inflasi di Indonesia pada tahun 2011-2021. Data tersebut merupakan data yang diperoleh melalui laman Bank Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 2013-2015, persentase rata-rata inflasi di Indonesia cukup tinggi, yaitu di atas 6%. Persentase inflasi yang tinggi dapat menunjukkan perekonomian yang tidak stabil pada negara tersebut dimana harga barang cenderung mengalami kenaikan. Sejak 2017 hingga 2021, persentase rata-rata inflasi di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini merupakan hal yang baik karena dapat dikatakan bahwa perekonomian di Indonesia dalam kondisi yang cukup baik dan harga barang cenderung stabil.



Grafik 2 Data Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2021 (CEIC Data)

Grafik di atas menunjukkan data tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2021. Data tersebut merupakan data yang diperoleh melalui laman CEIC Data. Dapat dilihat dari tahun 2011 hingga 2019, tingkat pengangguran di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami peningkatan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pandemi. Hal ini disebabkan oleh pandemic Covid-19, dimana perusahaan membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja karena kerugian yang dialami oleh perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengangguran

Pengangguran merupakan selisih dari angkatan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja yang sebenarnya. Pengangguran terdiri dari orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, serta orang yang memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi pada suatu negara dapat menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat mencukupi jumlah tenaga kerja yang ada. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia, karena tingkat pengangguran tinggi dapat mengakibatkan pendapatan negara berkurang (Indayani & Hartono, 2020). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi pada suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara akan berusaha untuk mengontrol tingkat pengangguran agar tidak terlalu tinggi. Tingkat pengangguran dapat menggambarkan seberapa baik kemampuan negara untuk menyerap tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Tingginya tingkat pengangguran pada suatu negara dapat menyebabkan kemiskinan dan bahkan memicu tingginya kriminalitas, serta menghambat berkembangnya pembangunan negara dalam jangka waktu yang cukup panjang (Purba, Nainggolan, & Panjaitan, 2022). Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang cukup parah, maka diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran (Basmar & Sugeng, 2019).

Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian yang dimiliki tenaga kerja, budaya malas, dan sebagainya (Rizal & Mukaromah, 2021). Selain beberapa faktor tersebut, salah satu penyebab pengangguran adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang dan jasa secara terus-menerus pada periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran pada suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Apabila suatu daerah mengalami inflasi yang cukup tinggi, maka tingkat pengangguran pada daerah tersebut juga dapat mengalami peningkatan. Hal

ini disebabkan oleh kebijakan perusahaan pada saat terjadinya inflasi. Pada umumnya, perusahaan akan membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja pada saat terjadinya inflasi. Sehingga tingkat pengangguran akan meningkat dan menyebabkan perekonomian suatu daerah akan mengalami penurunan (Bintang & Prana, 2020). Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menunjukkan perekonomian yang tidak stabil pada suatu negara, yang mengakibatkan naiknya harga suatu barang maupun jasa pada periode waktu tertentu sehingga tingkat kemiskinan juga meningkat (Ningsih & Andiny, 2018).

Untuk mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia, pemerintah membuat beberapa kebijakan agar dapat menyelesaikan masalah pengangguran tersebut. Kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guna mencapai kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa jenis kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan sebagainya (Tuwu, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami situasi sosial dengan membuat gambaran yang kompleks (Fadli, 2021). Umumnya penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih berfokus pada analisis pembahasannya. Metode penelitian ini menyajikan data-data hasil observasi pada suatu objek, yaitu data persentase rata-rata inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode tertentu. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan CEIC Data, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang terjadi pada akhir tahun 2019. Pandemi tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara global, sehingga perusahaan membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja guna meringankan biaya operasional perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan pemerintah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah membuat kebijakan untuk menarik investor dan meningkatkan ekspor. Kebijakan tersebut bertujuan memudahkan para pengusaha dan investor untuk menjalankan bisnis di Indonesia, sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan daya produksi dan daya saing perekonomian Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah guna meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran di Indonesia. Namun, pemerintah masih perlu mengambil langkah dan kebijakan untuk mengatasi akar permasalahan pengangguran di Indonesia.

Kedua, pemerintah menyajikan informasi yang akurat mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia. Informasi tersebut dapat disajikan melalui berbagai macam media, seperti media koran, media sosial, majalah, internet, dan sebagainya. Informasi mengenai lapangan pekerjaan tersebut disajikan dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan, maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Ketiga, pemerintah menyediakan program pelatihan kerja kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Program pelatihan tersebut dapat disediakan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan kerja yang ada di lingkungan sekitar. Program pelatihan kerja dapat ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Karena pada umumnya, masyarakat yang tidak memiliki latar belakang

pendidikan yang baik tidak memiliki banyak keahlian ataupun *soft skills*. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat di Indonesia yang membutuhkan pekerjaan memperoleh keterampilan atau *soft skills* yang akan bermanfaat di dunia pekerjaan. Apabila sebagian besar tenaga kerja di Indonesia memiliki keahlian dan *soft skill* yang memadai, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga akan berkurang. Hal ini dikarenakan perusahaan akan lebih mengutamakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan pada bidang tertentu.

Keempat, pemerintah menyediakan dan melakukan pengawasan pada program peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang baik dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di dunia pekerjaan, karena keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dapat diasah sejak dini melalui pendidikan. Namun pada daerah terpencil, terdapat banyak anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena tidak dapat mencukupi biaya pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program yang dapat memberikan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang dapat menghambat perekonomian negara apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Tingkat pengangguran yang tinggi pada suatu negara menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Tingginya jumlah pengangguran di suatu negara dapat mengakibatkan kemiskinan, memicu kriminalitas, menghambat pembangunan negara pada jangka waktu tertentu, dan sebagainya. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah inflasi. Pada saat inflasi, perusahaan akan membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja guna meringankan biaya operasional, sehingga tingkat pengangguran pada suatu negara akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi penanggulan, seperti kebijakan untuk menarik investor dan meningkatkan ekspor, menyediakan program pelatihan kerja, menyediakan program peningkatan mutu pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya beberapa kebijakan tersebut, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada pemerintah agar permasalahan pengangguran di Indonesia dapat diatasi. Adapun beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat meningkatkan program pelatihan kerja, agar masyarakat dapat melatih lebih banyak keahlian dan keterampilan yang akan diperlukan di dunia pekerjaan.
2. Pemerintah dapat memfokuskan arah pembangunan dengan mendorong pertumbuhan masyarakat, terutama pada masyarakat kurang mampu.
3. Pemerintah menyediakan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat yang sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basmar, E., & Sugeng, R. (2019). Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Mirai Managemnt*, 6(1), 38–50. Retrieved from <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/673/384>
- [2] Bintang, S. Y., & Prana, R. R. (2020). Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan. *Jurnal Studi Manajemen*, 2(2), 97–100. Retrieved from <https://journals.synthesispublication.org/index.php/civitas/article/view/156/142>
- [3] Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- [4] Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208. Retrieved from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581/4408>

- [5] Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pegaaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- [6] Nurrahman, A. (2020). *Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Indonesia*. 2(1), 1–8.
- [7] Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v4i1.336>
- [8] Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Akibat Pandemi Covid 19*.
- [9] Sari, A. P. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar*.
- [10] Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>